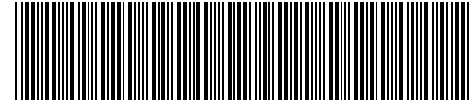




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.05.1.692990/2025**



DS:6945-4064-1050-0592

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
- Sebesar : Rp. 486.710.325.000 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS SEPULUH JUTA TIGA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	82.832.134.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	403.878.191.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 486.710.325.000

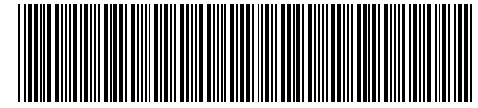
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025



DS:6945-4064-1050-0592

Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	151.442.273.000
BF.7115	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp.	14.782.755.000
BF.7116	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi	Rp.	30.895.628.000
BF.7117	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp.	17.545.103.000
BF.7118	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp.	26.744.976.000
BF.7119	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp.	7.985.663.000
BF.7120	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp.	53.488.148.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	335.268.052.000
WA.7122	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp.	335.268.052.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : I A. 1

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				151.442.273.000
Kegiatan	:	7115	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri				14.782.755.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Layanan Hak Cipta yang Diselesaikan				
		2. 02	Persentase Layanan Desain Industri yang Diselesaikan				
		3. 03	Jumlah Data Kekayaan Intelektual Komunal				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7115.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,00	NSPK		2.642.520.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal	3,00	NSPK		2.642.520.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7115.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	127.000,00	layanan		11.500.099.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Hak Cipta	120000.00	layanan		1.325.548.000
		02 BAH.002	Layanan Desain Industri	5500.00	layanan		8.657.499.000
		03 BAH.003	Advokasi Hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri	300.00	layanan		236.370.000
		04 BAH.004	Layanan Kekayaan Intelektual Komunal	1200.00	layanan		1.280.682.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7115.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga		640.136.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pembinaan Lembaga Manajemen Kolektif	1,00	Lembaga		640.136.000
Kegiatan	:	7116	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi				30.895.628.000
	:	1. 01	Persentase Kesepakatan Kerja Sama yang ditindaklanjuti				
		2. 01	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual				
		3. 02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



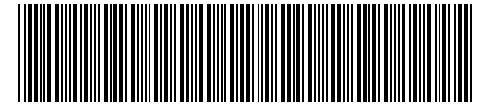
DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	4	:	7116.AEC	Kerja sama	62.00	Kesepakatan	13.146.788.000
Rincian Output		:	01	AEC.001 Kerja Sama Luar Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual	27.00	Kesepakatan	9.111.206.000
		:	02	AEC.002 Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang Kekayaan Intelektual	35.00	Kesepakatan	4.035.582.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7116.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5.00	NSPK	454.482.000
Rincian Output		:	01	AFA.001 Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di bidang Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual	5.00	NSPK	454.482.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7116.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	21.000,00	Orang	17.294.358.000
Rincian Output		:	01	BDC.001 Diseminasi Kekayaan Intelektual	10000.00	Orang	10.813.524.000
		:	02	BDC.002 Edukasi Kekayaan Intelektual	10000.00	Orang	3.331.122.000
		:	03	BDC.003 Pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual	1000.00	Orang	3.149.712.000
Kegiatan		:	7117	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis			17.545.103.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase Layanan Merek yang Diselesaikan			
		:	2. 02	Persentase Layanan Indikasi Geografis yang Ditindaklanjuti			
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7117.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2,00	NSPK	4.292.479.000
Rincian Output		:	01	AFA.001 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	2,00	NSPK	4.292.479.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7117.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	72.511,00	layanan	13.252.624.000
Rincian Output		:	01	BAH.001 Layanan Merek	71708.00	layanan	3.534.910.000
		:	02	BAH.002 Layanan Indikasi Geografis	18.00	layanan	4.968.675.000
		:	03	BAH.003 Keputusan atas Permohonan Banding Merek	540.00	layanan	3.992.555.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : I A. 3

		Pelayanan Publik Lainnya				layanan	
	04	BAH.004	Advokasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis	245.00	layanan		756.484.000
Kegiatan	: 7118		Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang				26.744.976.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01		Persentase Layanan Paten yang Ditindaklanjuti				
	2. 02		Persentase Layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Diselesaikan				
	3. 03		Persentase Layanan Rahasia Dagang yang Diselesaikan				
Klasifikasi Rincian Output	9	: 7118.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3,00	NSPK		9.784.214.000
Rincian Output	: 01	AFA.001	Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	3,00	NSPK		9.784.214.000
Klasifikasi Rincian Output	10	: 7118.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	13.225,00	layanan		16.960.762.000
Rincian Output	: 01	BAH.001	Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	13000,00	layanan		13.082.033.000
	02	BAH.002	Keputusan atas Permohonan Banding Paten	25,00	layanan		3.639.149.000
	03	BAH.003	Advokasi Hukum Terkait Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	200,00	layanan		239.580.000
Kegiatan	: 7119		Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa				7.985.663.000
	: 1. 01		Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual				
	2. 02		Persentase Penyelesaian Sengketa HKI Non Litigasi Secara Optimal				
Klasifikasi Rincian Output	11	: 7119.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2,00	NSPK		2.277.596.000
Rincian Output	: 01	AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI	2,00	NSPK		2.277.596.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



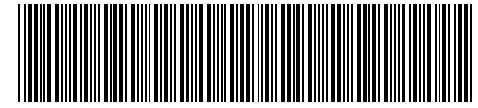
DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	12	:	7119.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	60,00	layanan	1.503.528.000
Rincian Output		:	01 BAH.001	Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	60,00	layanan	1.503.528.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	7119.BCE	Penanganan Perkara	43,00	Perkara	4.204.539.000
Rincian Output		:	01 BCE.001	Penanganan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	25,00	Perkara	3.767.805.000
		:	02 BCE.002	Pelaksanaan Mediasi Sengketa HKI	18,00	Perkara	436.734.000
Kegiatan		:	7120	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual			53.488.148.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen KI (availability time)			
Klasifikasi Rincian Output	14	:	7120.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK	4.981.622.000
Rincian Output		:	01 AFA.001	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	5,00	NSPK	4.981.622.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	7120.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	10.125.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual	1,00	Data	10.125.000
Klasifikasi Rincian Output	16	:	7120.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	Unit	33.943.824.000
Rincian Output		:	01 CAN.001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual	1,00	Unit	33.943.824.000
Klasifikasi Rincian Output	17	:	7120.CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	351.837.000
Rincian Output		:	01 CDS.001	Layanan Pemeliharaan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Kekayaan Intelektual	1,00	Titik/Lokasi	351.837.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



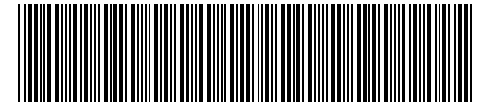
DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	18	:	7120.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1,00	Sistem Informasi	14.200.740.000
Rincian Output		:	01 FAB.001	Sistem Informasi Kekayaan Intelektual	1,00	Sistem Informasi	14.200.740.000
Program		:	135.05.WA	Program Dukungan Manajemen			335.268.052.000
Kegiatan		:	7122	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual			335.268.052.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual			
		:	2. 02	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual terhadap Layanan Kesekretariatan			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7122.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	225.986.091.000
Rincian Output		:	01 EBA.001	Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Pengaduan	1,00	Layanan	19.942.127.000
		:	02 EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan	137.484.000
		:	03 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,00	Layanan	441.900.000
		:	04 EBA.959	Layanan Protokoler	1,00	Layanan	15.474.749.000
		:	05 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	5.581.855.000
		:	06 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	101.575.842.000
		:	07 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	82.832.134.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7122.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	601,00	Unit, m2, Paket	23.585.482.000
Rincian Output		:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	600,00	Unit	14.214.482.000
		:	02 EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1,00	Unit	9.371.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7122.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	10,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	34.143.416.000
Rincian Output		:	01 EBC.001	Layanan Pengelolaan SDM	4,00	Layanan	31.343.707.000
		:	02 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	6,00	Layanan	2.799.709.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : I A. 6

Layanan Manajemen SDM Internal

Orang, Layanan, Rekomendasi

Klasifikasi Rincian Output	4	:	7122.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	21,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	48.796.159.000	
Rincian Output		:	01	EBD.001	Penyusunan Program dan Supervisi Anggaran	4,00	Dokumen	2.507.004.000
			02	EBD.002	Fasilitasi Peningkatan dan Evaluasi Kinerja	5,00	Dokumen	14.496.034.000
			03	EBD.003	Layanan Pengelolaan Keuangan	3,00	Dokumen	20.289.873.000
			04	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	552.500.000
			05	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	240.000.000
			06	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	508.000.000
			07	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	2,00	Dokumen	4.009.108.000
			08	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	4,00	Dokumen	6.193.640.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7122.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK	2.756.904.000	
Rincian Output		:	01	PFA.001	Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia (PN)	1,00	NSPK	2.756.904.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

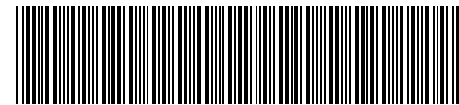
ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025

I B. SUMBER DANA



DS:6945-4064-1050-0592

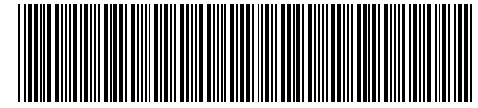
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	486.710.325.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	82.832.134.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	403.878.191.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692990	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	50.632.411	405.582.262	30.495.652	-	-	486.710.325		
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	144.532.103	6.910.170	-	-	151.442.273		
7115	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	-	14.782.755	-	-	-	14.782.755		
7115.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.642.520	-	-	-	2.642.520	01 . 51	
04	PNBP	-	2.642.520	-	-	-	2.642.520	139@	
7115.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	11.500.099	-	-	-	11.500.099	01 . 51	
04	PNBP	-	11.500.099	-	-	-	11.500.099	139@	
7115.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	640.136	-	-	-	640.136	01 . 51	
04	PNBP	-	640.136	-	-	-	640.136	139@	
7116	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi	-	30.895.628	-	-	-	30.895.628		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



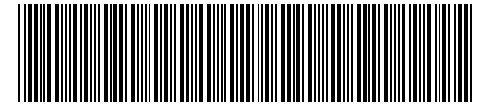
DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7116.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	13.146.788	-	-	-	13.146.788	01 . 51	
04	PNBP	-	13.146.788	-	-	-	13.146.788	139@	
7116.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	454.482	-	-	-	454.482	01 . 51	
04	PNBP	-	454.482	-	-	-	454.482	139@	
7116.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	17.294.358	-	-	-	17.294.358	01 . 51	
04	PNBP	-	17.294.358	-	-	-	17.294.358	139@	
7117	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	-	17.545.103	-	-	-	17.545.103		
7117.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.292.479	-	-	-	4.292.479	01 . 51	
04	PNBP	-	4.292.479	-	-	-	4.292.479	139@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



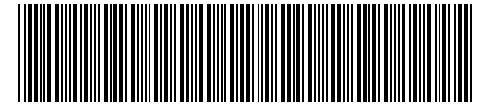
DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7117.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	13.252.624	-	-	-	13.252.624	01 . 51	
04	PNBP	-	13.252.624	-	-	-	13.252.624	139@	
7118	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	-	26.744.976	-	-	-	26.744.976		
7118.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	9.784.214	-	-	-	9.784.214	01 . 51	
04	PNBP	-	9.784.214	-	-	-	9.784.214	139@	
7118.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	16.960.762	-	-	-	16.960.762	01 . 51	
04	PNBP	-	16.960.762	-	-	-	16.960.762	139@	
7119	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	-	7.985.663	-	-	-	7.985.663		
7119.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.277.596	-	-	-	2.277.596	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNB		-	2.277.596	-	-	-	2.277.596	139@	
7119.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.503.528	-	-	-	1.503.528	01 . 51	
04 PNB		-	1.503.528	-	-	-	1.503.528	139@	
7119.BCE	Penanganan Perkara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.204.539	-	-	-	4.204.539	01 . 51	
04 PNB		-	4.204.539	-	-	-	4.204.539	139@	
7120	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	-	46.577.978	6.910.170	-	-	53.488.148		
7120.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.981.622	-	-	-	4.981.622	01 . 51	
04 PNB		-	4.981.622	-	-	-	4.981.622	139@	
7120.BMA	Data dan Informasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	10.125	-	-	-	10.125	01 . 51	
04 PNB		-	10.125	-	-	-	10.125	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



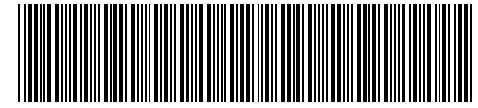
DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7120.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	30.833.654	3.110.170	-	-	33.943.824	01 . 51	
04	PNBP	-	30.833.654	3.110.170	-	-	33.943.824	139@	
7120.CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	351.837	-	-	-	351.837	01 . 51	
04	PNBP	-	351.837	-	-	-	351.837	139@	
7120.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	10.400.740	3.800.000	-	-	14.200.740	01 . 51	
04	PNBP	-	10.400.740	3.800.000	-	-	14.200.740	139@	
135.05.WA	Program Dukungan Manajemen	50.632.411	261.050.159	23.585.482	-	-	335.268.052		
7122	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	50.632.411	261.050.159	23.585.482	-	-	335.268.052		
7122.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	50.632.411	175.353.680	-	-	-	225.986.091	01 . 51	
01	RM	50.632.411	32.199.723	-	-	-	82.832.134	139	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kewenangan : (KP)

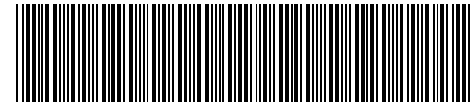
Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNB		-	143.153.957	-	-	-	143.153.957	139@	
7122.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	23.585.482	-	-	23.585.482	01 . 51	
04 PNB		-	-	23.585.482	-	-	23.585.482	139	
7122.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	34.143.416	-	-	-	34.143.416	01 . 51	
04 PNB		-	34.143.416	-	-	-	34.143.416	139@	
7122.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	48.796.159	-	-	-	48.796.159	01 . 51	
04 PNB		-	48.796.159	-	-	-	48.796.159	139@	
7122.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.756.904	-	-	-	2.756.904	01 . 51	
04 PNB		-	2.756.904	-	-	-	2.756.904	139@	
JUMLAH		50.632.411	405.582.262	30.495.652	-	-	486.710.325		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692990	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	17.403.347	39.247.765	41.767.287	45.698.953	42.259.383	45.883.953	45.858.673	46.803.716	42.398.512	42.530.713	38.542.718	38.315.304	486.710.325
		BELANJA PEGAWAI	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.385	50.632.411
		BELANJA BARANG	11.371.438	33.090.856	35.360.378	39.492.044	36.027.474	39.602.044	39.626.764	40.571.807	36.141.603	36.248.804	31.888.775	26.160.275	405.582.262
		BELANJA MODAL	1.812.543	1.937.543	2.187.543	1.987.543	2.012.543	2.062.543	2.012.543	2.012.543	2.037.543	2.062.543	2.434.577	7.935.644	30.495.652
135.05.BF.7115		Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	48.854	1.172.364	366.597	2.451.900	1.250.971	1.864.690	1.867.686	2.105.946	689.163	1.284.076	1.592.934	87.574	14.782.755
135.05.BF.7116		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi	48.854	1.172.364	366.597	2.451.900	1.250.971	1.864.690	1.867.686	2.105.946	689.163	1.284.076	1.592.934	87.574	14.782.755
135.05.BF.7117		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	979.032	1.417.796	2.374.529	8.975.446	1.829.382	4.541.894	3.025.188	2.875.647	1.654.696	2.352.038	609.820	260.160	30.895.628
135.05.BF.7118		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	979.032	1.417.796	2.374.529	8.975.446	1.829.382	4.541.894	3.025.188	2.875.647	1.654.696	2.352.038	609.820	260.160	30.895.628
135.05.BF.7119		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	83.920	646.044	830.035	769.723	2.293.357	3.738.905	2.754.881	1.830.488	1.648.162	2.164.766	484.277	300.545	17.545.103
135.05.BF.7118		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	83.920	646.044	830.035	769.723	2.293.357	3.738.905	2.754.881	1.830.488	1.648.162	2.164.766	484.277	300.545	17.545.103
135.05.BF.7119		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	796.692	1.167.417	2.704.069	3.995.815	2.961.158	3.278.205	3.596.556	2.674.832	2.889.953	1.772.897	582.193	325.189	26.744.976
135.05.BF.7119		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	796.692	1.167.417	2.704.069	3.995.815	2.961.158	3.278.205	3.596.556	2.674.832	2.889.953	1.772.897	582.193	325.189	26.744.976
135.05.BF.7119		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	0	665.434	665.434	665.434	665.434	665.434	681.786	665.434	665.434	665.434	1.980.407	0	7.985.663
135.05.BF.7119		52 BELANJA BARANG DAN BARANG Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	0	665.434	665.434	665.434	665.434	665.434	681.786	665.434	665.434	665.434	1.980.407	0	7.985.663

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692990) DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

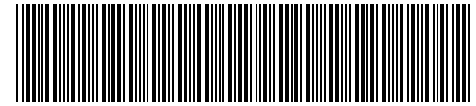
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	135.05.BF.7120	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	996.134	5.553.971	5.803.971	2.907.188	2.932.188	2.982.188	6.381.664	6.808.677	6.691.312	6.807.916	4.298.352	1.324.587	53.488.148	
	135.05.WA.7122	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	675.176	5.108.013	5.108.013	2.411.230	2.411.230	2.411.230	5.860.706	6.287.719	6.145.354	6.236.958	3.355.360	566.990	46.577.978	
		53 BELANJA MODAL	320.958	445.958	695.958	495.958	520.958	570.958	520.958	520.958	545.958	570.958	942.992	757.597	6.910.170	
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	14.498.715	28.624.740	29.022.652	25.933.448	30.326.894	28.812.637	27.550.912	29.842.693	28.159.792	27.483.586	28.994.735	36.017.249	335.268.052	
		51 BELANJA PEGAWAI	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.366	4.219.385	50.632.411
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	8.787.764	22.913.789	23.311.701	20.222.497	24.615.943	23.101.686	21.839.961	24.131.742	22.448.841	21.772.635	23.283.784	24.619.817	261.050.159	
		53 BELANJA MODAL	1.491.585	1.491.585	1.491.585	1.491.585	1.491.585	1.491.585	1.491.585	1.491.585	1.491.585	1.491.585	1.491.585	1.491.585	7.178.047	23.585.482
		PERKIRAAN PENERIMAAN	77.916.664	77.916.664	77.916.664	77.916.664	77.916.664	77.916.664	77.916.664	77.916.664	77.916.664	77.916.664	77.916.664	77.916.664	77.916.696	935.000.000
		- PNBP (425218)	3.016.541	3.016.541	3.016.541	3.016.541	3.016.541	3.016.541	3.016.541	3.016.541	3.016.541	3.016.541	3.016.541	3.016.541	3.016.549	36.198.500
	- PNBP (425218)	45.840.066	45.840.066	45.840.066	45.840.066	45.840.066	45.840.066	45.840.066	45.840.066	45.840.066	45.840.066	45.840.066	45.840.066	45.840.074	550.080.800	
	- PNBP (425218)	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666	41.674	500.000	
	- PNBP (425218)	29.018.391	29.018.391	29.018.391	29.018.391	29.018.391	29.018.391	29.018.391	29.018.391	29.018.391	29.018.391	29.018.391	29.018.391	29.018.399	348.220.700	

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692990] DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692990	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	7115.BAH	Pelayanan Publik Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 117.940.032	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	52 Belanja Barang Rp. 114.829.862		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.506.984
	53 Belanja Modal Rp. 3.110.170		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7115	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
7115.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.574
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.810	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 403.685
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.160	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.053.172
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 245.800	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	7115.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.406
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 263.086		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.040
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 525.386		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 89.278

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692990] DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7116 7116.AEC	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7116.BDC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.775 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 103.485 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Kerja sama		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 608.042 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 608.042 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.053 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 188.205 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 238.060 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 652.217 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 777.946 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.410.978 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.143.982 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.630.926 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 769.293 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.644 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	7116.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692990] DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7117 7117.AFA	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7118 7118.AFA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 127.140 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.240.875 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 403.757 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.096 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.136.738 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.514.517 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.400 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 598.628 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.648.330 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 204.241 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.856.295 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 403.757 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.136.738 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
7117.BAH	Pelayanan Publik Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.514.517 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	7118.BAH	Pelayanan Publik Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.856.295 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692990] DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN			
7119	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7119.BAH	Pelayanan Publik Lainnya			
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)			
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 773.412		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 588.220			
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)			
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.672.250		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.480			
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		7119.BCE	Penanganan Perkara		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.124.892	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)					
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.530.923					
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024					
7119.AFA	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		7120		
	7119.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			7120.AFA	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)				524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.500				Tidak Dapat Dicairkan Rp. 658.012
		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)				
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 334.333				
		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024				
		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP)						
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 642.120						
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024						
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya						

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692990] DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
7120.CAN	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 82.105 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7120.CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 475.418 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 161.819 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 906.551 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		7120.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.716.900 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.259.209 Memerlukan Clearance dari Kominfo dan KemenPAN/RB Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		135.05.WA 7122 7122.EBA	Program Dukungan Manajemen
	522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.916.637 Memerlukan Clearance dari Kominfo dan KemenPAN/RB Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 169.804 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Layanan Dukungan Manajemen Internal
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.110.170 Memerlukan Clearance dari Kominfo dan KemenPANRB Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.192.305 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
				524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 641.955 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
				524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.295.652 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692990] DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7122.EBC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.351.331 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	7122.EBD	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Manajemen Kinerja Internal 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.884.697 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.704.179 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 403.695 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.291.618 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.101.494 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.250 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.740.342 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.691.588 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.480.364 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.261.968 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 215.850 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.158.723		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692990] DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 627.648 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.1.692990/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:6945-4064-1050-0592

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692990] DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692990	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL		
135.05.WA	Program Dukungan Manajemen		
7122	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual		
7122.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
		Rp.	9.371.000
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	* Renovasi Gedung DJKI Sentra Mulia lantai 19 seluas 2628 m2	Rp.	9.371.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002